

BAB III

DUGAAN TINDAK PIDANA MAKAR (PASAL 107 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA) SERTA DITETAPKANNYA SEBAGAI TERSANGKA TERHADAP SRI BINTANG PAMUNGKAS

A. Sekilas Tentang Sri Bintang Pamungkas

1. Biografi Sri Bintang Pamungkas

Ir. Sri Bintang Pamungkas, S.E., M.Si., Ph.D. Lahir lahir dari keluarga sederhana di Tulungagung, Jawa Timur, 25 Juni 1945. Ayahnya Moenadji Soerjohadi Koesoemo, adalah seorang hakim, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga Soekartinah. Sri Bintang Pamungkas adalah seorang tokoh pergerakan, reformis, aktivis, politikus dan juga orator hebat dalam masa-masa akhir jabatan dan penggulingan Presiden Soeharto. Ia juga merupakan Pendiri Partai PUDI dan juga pernah menjadi narapidana di Era Presiden Soeharto.¹

Pada tahun 1964, ia lulus dari SMA Negeri I Surakarta, Jawa Tengah. Tahun 1979 ia melanjutkan studi ke Universitas Southern Carolina dan memperoleh gelar Master (MSISE) (Master of Science in Industrial System Engineering). Pada tahun 1984, Bintang tertarik belajar ekonomi dan atas bantuan Georgia Institute of Technology ia bisa mengikuti program doktor di Iowa State University. ia meraih doktor PhD.² Sri Bintang Pamungkas memiliki enam karya tulis yang telah ia buat antara lain:

¹ Wikipedia Ensklopedia Bebas, "Sri Bintang pamungkas"
https://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Bintang_PamungkasKehidupan_awal_dan_pendidikan, (18, Januari, 2018).
² Anne Ariani, " Biografi Ir. Sribintang Pamungkas M.Si., Ph.D., S.E",
<http://goencekep.blogspot.co.id/2013/09/biografi-ir-sri-bintang-pamungkas-msi.html>, (18, Januari, 2018).

- a) Getaran Mekanis Tahun 1975
- b) Metode Numerik Tahun 1989
- c) Manajemen Industri Tahun 1990
- d) Teknik system Tahun 1992
- e) Pokok – pokok Pikiran sribintang Pamungkas Tahun 1994
- f) Ganti Rezim Sistem Tahun 2014.

2. Kiprah Politik Sri Bintang Pamungkas

Terjun ke dunia politik adalah jalan panjang bagi Sri Bintang Pamungkas. Sebelumnya, Sri Bintang adalah lulusan teknik penerbangan ITB. Bersentuhan dengan politik praktis, ia mulai pada tahun 1992 bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pun bercita-cita agar umat Islam harus memiliki kekuatan dan daya saing dengan yang lain. Ia pun berjanji membesarkan PPP sebagai partai besar umat Islam di Orde Baru.

Pada tahun 1993, menjelang pemilu, Bintang masuk ke PPP. Hebatnya, ketika itu nama Bintang langsung populer. Padahal ia bukan kader PPP. Bintang tak mau setengah-setengah dengan pilihannya, masuk PPP bukan tanpa cita-cita. Karena melihat umat Islam kurang maju, kurang daya pukulnya. Bintang bercita-cita agar PPP menjadi partai yang besar. Untuk itu Bintang mengaku sudah mempersiapkan segala sesuatunya.³

Sri Bintang Pamungkas berprofesi sebagai politikus dan masih bekerja jadi Konsultan senior PT Summa International, 1986 – 1991, dan Dosen di

³ Anne Ariani, “ Biografi Ir. Sribintang Pamungkas M.Si., Ph.D., S.E”
<http://goencekep.blogspot.co.id/2013/09/biografi-ir-sri-bintang-pamungkas-msi.html>, (18, Januari, 2018).

Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), 1972-sampai sekarang, juga sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 1992, lalu Anggota DPR dari PPP, 1992-1996, dan Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), 1996-1999. Cita-cita ingin membuat pesawat terbang, pria lulusan teknik ITB ini justru terbang dengan impian politiknya. Ketua Biro Pendidikan Himpunan Mahasiswa Mesin, 1971, Bekerja di pabrik perakitan sepeda motor Honda milik Astra, PT Federal Motor, 1971-1974, Konsultan di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), 1972-1974, Dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), 1972-sampai sekarang, Instruktur pada Program Perencanaan Nasional, 1974-1977, Ahli senior di Yayasan Bina Pembangunan, 1985-1987, Anggota Dewan Pakar ICMI, 1987, Anggota senior Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri, 1986, Konsultan senior PT Summa International, 1986 – 1991, Anggota Partai Persatuan.

Sri Bintang Pamungkas menjadi aktivis politik yang selalu berlawanan dengan penguasa. Pria kelahiran Tulungagung, 25 Juni 1945 ini dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Bahkan, karena kekuatannya mengkritisi pemerintah ia sempat masuk bui. Tapi, hal tersebut tak membuat dirinya ciut, tapi semakin menggodok api semangatnya. Terjun ke dunia politik adalah jalan panjang bagi pria lulusan master dan doktor teknik luar negeri ini. Sebelumnya, Sri Bintang adalah lulusan teknik penerbangan ITB. Lulus kuliah, ia ingin bekerja sebagai insinyur pembuat pesawat terbang. Sayang, karena saat itu di Indonesia belum ada, ia akhirnya bekerja di pabrik rakitan motor Astra. Selain bekerja, ia juga menjadi dosen teknik dan konsultan di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Di tengah profesi barunya itu, Sri Bintang meneruskan kuliah di S2, Master of Science in Industrial System Engineering di

Universitas Southern Carolina dan Program Doktor Teknik Industri di Iowa State University, AS. Sekembalinya ke Indonesia, pada tahun 1985, Sri Bintang mulai berkarier kembali sebagai dosen UI mata kuliah pengantar ekonomi, Finance and Investment, Introduction to Mechanics and Electronics in Factory, Supply Chain Management, dan Industrial Policy. Di luar kampus, ia juga mulai bertemu dan berkumpul dengan tokoh-tokoh Islam Indonesia lainnya. Ia bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sejak organisasi berdiri hingga tahun 1987 dengan jabatan anggota Dewan Pakar. Bersentuhan dengan politik praktis, ia mulai pada tahun 1992 bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pun bercita-cita agar umat Islam harus memiliki kekuatan dan daya saing dengan yang lain. Ia pun berjanji membesarkan PPP sebagai partai besar umat Islam di Orde Baru.

Sri Bintang tak bertahan lama di PPP. Ia direcall dari anggota DPR karena sikap kritisnya kepada Presiden Soeharto. Ia mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada 29 Mei 1996. Perlawanan terhadap penguasa semakin kuat. Pada 11 Oktober 1996, Sri Bintang dengan lantang menantang Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru, agar melakukan pemilihan presiden secara langsung. Suaranya menggema di Indonesia Petroleum Club, Jakarta.

PENDIDIKAN SMA Negeri I, Surakarta, Jawa Tengah (1964), S1, Jurusan Teknik Penerbangan Institut Teknologi Bandung (ITB), 1966-1971, S2, Master of Science in Industrial System Engineering di Universitas Southern Carolina, AS, 1979, S3, Program Doktor Teknik Industri di Iowa State University, AS. 1984, setelah ia sempat memproklamirkan dirinya sebagai calon presiden dan Julius Usman sebagai wakilnya, Bintang menyebarkan selebaran yang diselipkan ke kartu lebaran yang sukses membuat kebanyakan anggota MPR/DPR terkejut.

Selebaran tersebut berisi penolakan Pemilu 1997, penolakan Soeharto untuk kembali jadi presiden, dan perombakan tatanan pemerintahan dengan mengubah UUD 1945. Akibat kritik kerasnya terhadap penguasa, Sri Bintang masuk bui di LP Cipinang, Jakarta, karena tuduhan subversif. Setelah gelombang aksi menuntut Soeharto lengser, pada 1998, menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi dengan Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto. Bersamaan dengan itu, tahanan politik termasuk Sri Bintang dibebaskan oleh pemerintah Habibie. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama Era Reformasi, Sri Bintang mendaftarkan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) sebagai salah satu partai peserta pemilu. Sayang, partai ini tidak meloloskan wakilnya ke Senayan. Sekitar 16 tahun Era Reform bergulir.

B. Kronologi Kasus Sri Bintang Pamungkas Dan Penetapannya Sebagai Tersangka Oleh Kepolisian Republik Indonesia

1. Kronologi Aksi Bela Islam

Aksi Bela Islam adalah rangkaian aksi unjuk rasa yang diadakan di Indonesia, lebih tepatnya di kota Jakarta merupakan bentuk reaksi atas pernyataan gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mengeluarkan pernyataan dianggap menistakan agama dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu.⁴ Pada 27 September 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka yang berlokasi di Kepulauan Seribu.⁵ Kunjungan ini dilakukan untuk peninjauan serta pengarahan terkait

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*,34.

⁵ Suryono, "Asal Muasal Aksi Bela Islam III, 2 Desember 2016 (Aksi 212)", <https://www.jualkaosmuslimgaul.com/2016/12/asal-muasal-aksi-bela-islam-212.html>, (30, 04, 2018).

program pemberdayaan budi daya ikan kerapu yang menjadi salah satu program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pernyataannya Basuki berusaha meyakinkan warga bahwa programnya akan terus berjalan meski ia tidak terpilih sebagai Gubernur pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan berlangsung pada Februari 2017. Sebagaimana kebiasaan dalam rapat dan kunjungan kerja, video aktivitas Basuki ini pun diunggah melalui akun Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Melalui media sosial Facebook menjadi titik awal mencuatnya pemberitaan terkait penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tersebar melalui akun facebook Buni Yani pada tanggal 6 Oktober 2016 mengunggah ulang kutipan video diberi judul Penistaan Terhadap Agama. Sebanyak 346,354 tayangan penyebaran wacana dan sebanyak 11.033 kali dibagikan ulang (reshared). Video sebagai salah satu produksi pengetahuan disempurnakan dengan caption menambah rasa ingin tahu pemirsa media sosial meningkat.⁶ Video yang diunggah dengan 346.354 tayangan, 3,8 ribu emoticon dan 11,033 komentar tersebut merupakan salah pemicu Aksi Bela Islam. Buni Yani menuliskan status dan caption videonya dengan kalimat sebagai berikut:

Penistaan terhadap Agama? Bapak - Ibu pemilih muslim dibohongi surat Al-Maidah ayat 51 dan masuk neraka juga, Bapak -ibu dibodohi Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.

Penulisan status Facebook yang tidak utuh dengan video tayangan yang diambil dari potongan rekaman melalui fitur video di smartphone turut memberi andil pada eskalasi (peningkatan) polemik mengenai penistaan agama. Respon

⁶ Gita Octaviani, *Jurnal Pemikiran Sosiologi Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring*, 2 Agustus 2017.

terhadap unggahan video sangat cepat dengan setting terlihat oleh publik. Media sosial menjadi pelancar wacana dominan dalam Aksi Bela Islam.

Sebagai respon dari video yang telah diposting, banyak dari ormas Islam di penjuru Indonesia mengirimkan pengaduan kepada kepolisian agar segera menindak lanjuti pernyataan Basuki tersebut. Pada 10 Oktober 2016, Basuki meminta maaf kepada publik karena telah menimbulkan kegaduhan. Beberapa tokoh Islam menyatakan menerima pernyataan maaf yang ia ajukan namun menambahkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan. Belum adanya pemberitaan tentang penyelidikan mengesankan bahwa kepolisian Republik Indonesia lamban dalam menangani kasus Basuki sehingga masyarakat mengadakan beberapa aksi yang disebut Aksi Bela Islam.

Aksi bela Islam I pada 14 Oktober 2016 diawali dengan Shalat Jum'at di Masjid Istiqlal kemudian long march ke Bareskrim Mabes Polri di Gambir dan dilanjut ke Balai Kota DKI Jakarta. Aksi damai yang menuntut penegak hukum untuk segera memproses perihal penistaan agama oleh Ahok.⁷ Sebagai bentuk pembelaan terhadap Al-Qur'an, aksi ini diikuti oleh ratusan ribu peserta dari berbagai tokoh, ulama, Ormas Islam dan umat Islam darbeberapa wilayah, bahkan dari non-muslim juga ikut serta dalam aksi tersebut, dinilai tidak ada penanganan kasus Ahok dengan serius, masyarakat semakin geram dan merencanakan untuk melakukan aksi masa lanjutan.

Aksi bela Islam jilid II pada tanggal 4 November 2016 yang disebut aksi 411. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan tema “Seruan Jihad Konstitusional Bela Agama dan Negara” ini bukan

⁷ HA, “Aksi Bela Islam, Bukti Umat Cinta Islam dan Kedamaian”, <https://majalahayah.com/aksi-bela-islam-bukti-umat-cinta-islam-dan-kedamaian-bagian-1/>, (07, mei, 2018).

aksi sara dan politik pilkada tapi ini aksi penegakan hukum. Dalam aksi ini diawali long march dari Masjid Istiqlal ke Balai Kota DKI Jakarta, Patung Kuda, lalu menuju ke Istana Negara. Ribuan ormas Islam yang dipimpin oleh FPI melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dalam aksinya, mereka menuntut agar penyelidikan atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama segera dilakukan. Habib Rizieq Shihab yang juga pimpinan FPI mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tidak kunjung merespon kasus ini dalam 3 Minggu berikutnya.⁸ Selain di Jakarta, aksi serupa juga diadakan di beberapa kota lainnya di Indonesia. Sebagaimana aksi sebelumnya, unjuk rasa kali ini mendapatkan respon beragam di media tidak hanya nasional namun juga internasional,⁹ bahkan media seperti BBC mewawancarai Basuki terkait kasus yang menimpa dirinya. Dalam wawancara tersebut Basuki menuding para pendemo mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- untuk hadir dalam aksi tersebut.¹⁰ Hal ini menimbulkan persoalan baru karena banyak kalangan terutama para pendemo tidak terima terhadap tuduhan yang dilontarkan Basuki.

setelah aksi 411 ini selesai. Polri mulai memeriksa Ahok atas dugaan penistaan Agama. Proses pemeriksaan ini menjadi sorotan pemberitaan. Presiden menghimbau agar kasus ini dibuka secara transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya Ahok ditetapkan sebagai

⁸ Siswanto, "Demo Ormas Islam Bubar, Sebelum Pergi, Rizieq Keluarkan Ancaman", <https://www.suara.com/news/2016/10/14/172957/demo-ormas-islam-bubar-sebelum-pergi-rizieq-keluarkan-ancaman>, (30, 04, 2018).

⁹ Ian, "Demo 4 November Jadi Sorotan Media Asing", <https://international.sindonews.com/read/1152763/40/demo-4-november-jadi-sorotan-media-asing-1478249721>, (30, 04, 2018).

¹⁰ Samantha Hawley, "Jakarta Governor Ahok suspect in blasphemy case, Indonesian police say", <http://www.abc.net.au/news/2016-11-16/jakarta-governor-suspect-in-blasphemy-case-indonesian-police/8030406>, (30, 04, 2018).

tersangka dalam kasus penistaan Agama. Tapi masyarakat masih kecewa, Karena walaupun ahok sudah resmi menjadi tersangka tapi belum dilakuka penahanan oleh pihak kepolisian, dengan demikian GNPf MUI menjadi organisasi terdepan yang mewakili masyarakat muslim untuk menuntut pemerintah agar segera mengadili Ahok berencana untuk kembali melakukan aksi bela islam jilid 3 dengan tuntutan yang sama halnya tuntutan pada aksi jilid 1 dan 2.

Aksi tersebut dilanjutkan pada tanggal 2 desember 2016, Aksi Bela Islam Jilid III terjadi akibat adanya keraguan umat Islam Indonesia terhadap penegakan supremasi hukum oleh pemerintah terkait kasus penistaan agama karena Basuki Tjahaja Purnama belum ditahan. Aksi damai 2 Desember 2016 rencananya akan diisi dengan zikir, tausiah, doa bersama, dan ditutup dengan shalat Jumat di silang Monas, Jakarta Pusat. Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Rizieq Shihab mengatakan, aksi tersebut digelar untuk menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera dilimpahkan ke pengadilan. Aksi damai akan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Rizieq menjamin aksi akan berlangsung damai.¹¹

Disisi lain Menurut Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Hermawan Sulisty, ada beberapa orang yang dianggap mendomplengi aksi massa Bela Islam Jilid III dengan tuntutan memenjarakan Ahok karena tuduhan menghina kitab suci al-Qur'an.¹²

Sebab, wacana yang berkembang tidak hanya memenjarakan Ahok saja,

¹¹ Akhdi Martin Pratama, "Polisi Bersorban Akan Mengamankan Aksi Damai 2 Desember", <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/01/06063871/polisi.bersorban.akan.mengamankan.aksi.damai.2.desember>, (06, mei 2018).

¹² Achmad Sulaiman, "Aktor di Balik Aksi 212 Adalah Pemain Lama", <https://nusantaranews.co/aktor-di-balik-aksi-212-adalah-pemain-lama/>, (08, mei, 2018).

melainkan menggalang opini untuk menurunkan Presiden Joko Widodo di tengah jalan.

Di tengah berlangsungnya Aksi Bela Islam III, Polisi menangkap 10 orang aktifis yang diduga melakukan makar. Mereka yang ditangkap di antaranya, Adityawarman, Jamran, Rizal Kobar, Eko Sur yo, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Sri Bintang Pamungkas. Para tokoh ini ditangkap karena diduga hendak melakukan makar untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Mereka juga dituding mendompleng aksi Bela Islam yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul menyampaikan bahwa penangkapan aktivis yang mendomplengi aksi bela Islam merupakan upaya untuk mencegah pemanfaatan Aksi Bela Islam III, menjadi gerakan menjatuhkan pemerintah.¹³ Dari sepuluh orang tersebut, penyidik Polri melakukan penahanan terhadap tiga orang berkaitan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dijerat dengan UU ITE dan satu lainnya dijerat pasal pemufakatan jahat. Sementara, delapan tersangka sisanya telah dilepaskan oleh penyidik Polri.

2. Penetapan Sri bintang Pamungkas Sebagai Tersangka Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Pada Jumat 2 Desember 2016 menjelang aksi demonstrasi bela Islam di Jakarta, aparat kepolisian Polda Metro Jaya menahan sepuluh tokoh dengan dugaan melakukan perbuatan makar. Dari sepuluh tokoh yang ditahan aparat

¹³ Firman, "Polri Penangkapan untuk Cegah Aksi 212 yang dimanfaatkan", <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/12/04/ohngcv404-polri-penangkapan-untuk-cegah-aksi-212-dimanfaatkan>, (09, Mei 2018).

kepolisian salahsatunya adalah Sri Bintang Pamungkas. Adapun Sri Bintang Pamungkas ditahan dan dijerat pasal makar dengan bukti sebuah Video yang diunggah pada akun Youtube serta sebuah surat permohonan menggelar Sidang Istimewa yang ditujukan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Markas Besar Tentara Negara Republik Indonesia (MABES TNI).¹⁴

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu 3 Desember 2016 menyampaikan bahwa penetapan Bintang sebagai tersangka berkaitan dengan konten dalam video di sebuah akun YouTube, yang diunggah pada November 2016. Dalam video tersebut, Sri Bintang diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat agar melakukan upaya makar. Dalam proses pemeriksaan, penyidik telah mengundang ahli IT, ahli bahasa, dan ahli pidana, Atas hal tersebut, Sri Bintang disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP.¹⁵ Berikut cuplikan pidato Sri Bintang Pamungkas yang terdapat pada Media Sosial Youtube:¹⁶

Kalau Anda jalan-jalan ke jalan itu, itu kan rumah ditawarkan ratusan juta bagaimana Anda bisa (membeli), tidak mungkin. Itu yang membangun adalah pengembang-pengembang yang mencari ketuntungan dan mengorbankan Anda dan itu yang disetujui pemerintah kita.

Pengembang-pengembang temannya Ahok itu. Itu sama sekali tak adil. Dimana letak Pancasila terutama sila kelima. Orang kaya itu semestinya dikasih

¹⁴ Deny Irwanto, Curahan Sri Bintang Pamungkas Setelah Ditangkap Terkait Dugaan Makar, <http://news.metrotvnews.com/read/2016/12/23/632247/curahan-sri-bintang-pamungkas-setelah-ditangkap-terkait-dugaan-makar>, 6 Juni 2018.

¹⁵ Abba Gabrillin, Sri Bintang Pamungkas Ditahan atas Dugaan Penghasutan Melalui Medsos, <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/03/13340301/sri.bintang.pamungkas.ditahan.atas.dugaan.penghasutan.melalui.medsos>, 6 Juni 2018.

¹⁶ Teguh Firmansyah, inikah Pidato Penggulingan Jokowi yang Buat Sri Bintang Jadi Tersangka Makar?, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/12/20/oigvli377-inikah-pidato-penggulingan-jokowi-yang-buat-sri-bintang-jadi-tersangka-makar>, 08 juni 2018.

pajak yang tinggi, hasilnya dipakai untuk membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar baru itu bisa.

Pemerintah kita dari Soeharto hingga kini tak melakukan itu. Apa yang saya simpulkan, mereka jahat. mereka tak bisa mengelola negara ini. Harus diturunkan, harus dijatuhkan sebagaimana kita pernah menjatuhkan Soeharto, kan kita tak perang, kita datang ke MPR minta agar MPR menurunkan Soeharto. Itu yang terjadi pada 21 Mei 1998 Soeharto jatuh.

Inilah yang saya pikir perlu kita lakukan kepada presiden-preside jahat termasuk Jokowi. Oleh karena itu maka kemarin dalam surat dakwaan saya, memang yang dihadirkan tedakwa Ahok, tapi Ahok kepanjangan tangan Jokowi, tidak syak lagi tidak perlu diragukan mereka berangkat bersama jadi cabud dan wagub bahkan mereka sudah merancang 2017, Ahok jadi gubernur, nanti 2019 jadi wakil presiden lalu selanjutnya jadi presiden.

Inilah saudara-saudara, Soeharto yang didukung militer polisi oleh ABRI saja bisa jatuh, masak Jokowi gak bisa jatuh. pasti bisa jatuh. Pernahkan Anda mendengar orang ditangkap waktu Soeharto jatuh tak ada. Jadi menjatuhkan presiden dengan cara itu bukan kejahatan.

Waktu Jokowi berdebat ditanya soal ekonomi rakyat, syok-syokan lah syok tahu ternyata dia gak bisa apa-apa. Dia menyalahi janji. Tak hanya menyalahi janji dia khianat. Karena ini sudah keterlaluan hukum tak berjalan KPK tak berjalan, Kegakgung dicekek presiden, Kapolri dicekek juga sama presiden, hakim-hakim juga ketatukan sama presiden. maka kita bikin pengadilan rakyat. Dan kemarin kita sudah ada keputusannya Ahok dhukum seumur hidup dengan bekerja paksa.

Disisi lain Pada 1 Desember 2016, Bintang mengantarkan surat bersama Dahlia Zein ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Markas Besar TNI Cilangkap.¹⁷

Dalam surat tersebut, Bintang yang mengaku mewakili Gerakan Nasional People Power Indonesia meminta pimpinan DPR untuk memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna menggelar Sidang Istimewa (SI-MPR RI) sesegera mungkin.

Sri Bintang meminta MPR melakukan tiga hal, yaitu mengembalikan UUD amandemen ke UUD asli, meminta MPR mencabut mandat Jokowi-Jusuf

¹⁷ Dhuha Hadiansyah, 3 Serangan Sri Bintang Pamungkas yang Membuat Telinga Jokowi Merah, <http://archive.rimanews.com/nasional/politik/read/20161210/309952/3-Serangan-Sri-Bintang-Pamungkas-yang-Membuat-Telinga-Jokowi-Merah>, 08 juni 2018.

Kalla sebagai presiden dan wakil, dan mengangkat penjabat presiden republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia. Berikut ini adalah isi dari surat Sri Bintang Pamungkas:

Kepada Yth : Pimpinan

*Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia d/a Gedung DPR/MPR-RI
Jl. Jenderal Hatot Soebroto Jakarta Selatan*

Dengan hormat,

Bersama ini, kami dari kelompok Gerakan Nasional People Power Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa exponen aktivis, sehubungan dengan situasi tanah air sekarang ini, sudah menyampaikan keinginan kami meminta kesediaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI-MPR RI) sesegera mungkin. Yaitu, dengan maksud menyelesaikan persoalan-persoalan Negara yang dari hari ke hari semakin berbahaya bagi kelangsungan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan akhir dari SI-MPR RI itu adalah untuk menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang meliputi:

- 1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- 2. Mencabut Mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang, masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla*
- 3. Mengangkat Penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia*

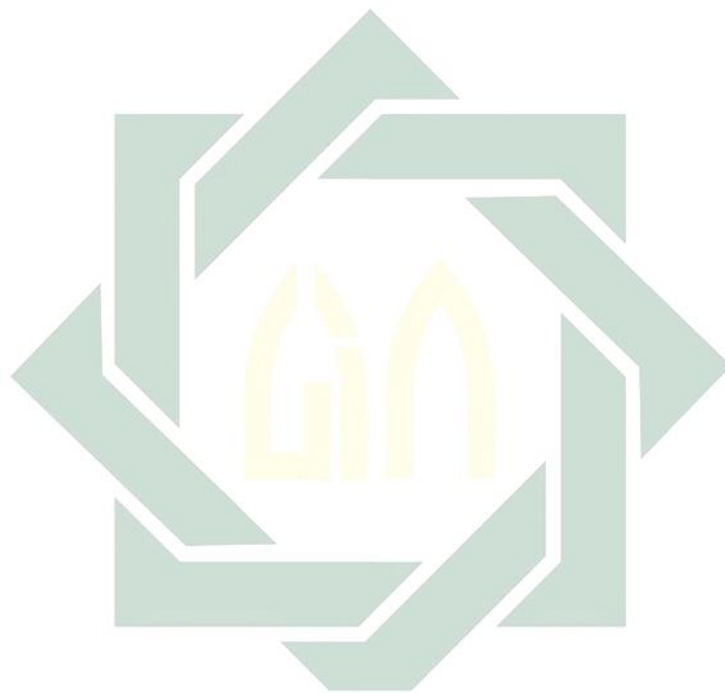
Demikian permintaan kami, dengan harapan MPR-RI dapat memenuhinya dengan segera. Terimakasih atas segala perhatian dan kesediaannya.

Hormat saya,

Sri-Bintang Pamungkas

Setelah Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap Sri Bintang Pamugkas selama 104 hari ditingkat penyidikan, pada tanggal 15 Maret 2017 kasus Sri Bintang Pamungkas ditangguhkan, dengan alasan utama penyidik

menanggihkan penahanan karena faktor kesehatan dan sampai saat ini status Sri Bintang Pamungkas masih sebagai tersangka.¹⁸



¹⁸ Jpn, Polri: Sri Bintang Bukan Dilepas tapi Ditanggihkan, <https://www.jpnn.com/news/polri-sri-bintang-bukan-dilepas-tapi-ditanggihkan>, 08 Juni 2018.